

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736.

Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013.

Putusan Nomor 30/Pdt-Sus/PHI/G/2016/PN Semarang.

Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Semarang.

Putusan Nomor 13 K/Pdt.Sus-Pailit/2025.

Dokumen Hukum Lain

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019

Buku

Aprita, Serlika. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*.

Palembang: Setara Press, 2018.

Faidal. *Hubungan Industrial*. 1st ed. Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2025.

Gunardi. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Edited by Murni. 1st ed. Jakarta:

Damera Press, 2022.

Jimly, Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Sekretariat Jenderal Dan*

Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. 1st ed. Vol. 1. Jakarta: Sekretariat

Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. 1st ed. NTB: Mataram University Press,

2020.

Rusli, Tami. *Hukum Kepailitan Di Indonesia*. Bandar Lampung: Universitas

Bandar Lampung Press, 2019.

Shubhan, M. Hadi. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, Dan Praktik Di Peradilan*.

1st ed. Jakarta: Kencana, 2019.

Solikin, Nur. *Buku Pengantar Penelitian Hukum*. Edited by Qiara Media. Pasuruan:

CV. Penerbit Qiara Media, 2021.

Sriwidodo, Joko, and Tumanggor. *Kajian Perkembangan Hukum Kepailitan Dan PKPU Di Indonesia*. 1st ed. Yogyakarta: Kepel Press, 2024.

Sudiarto. *Pengantar Hukum Kepailitan Indonesia*. Edited by Sarkawi. 1st ed. Mataram: Mataram University Press, 2022.

Susiani, Dina. *Perkembangan Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*. Jember: CV. Pustaka Abadi, 2020.

Wibowo, Agus. *Hukum Perburuhan*. Edited by Joseph Santoso, Teguh. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik Bekerja sama dengan Universitas Sains & Teknologi Komputer (Universitas STEKOM), 2024.

Widiarty, Wiwik Sri. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Edited by Muhammad Tajuddin. 1st ed. Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.

Wijayanti, Asri. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Edited by Tarmizi. 1st ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Yuhelson. *Hukum Kepailitan di Indonesia*. Edited by Mira Mirnawati. Gorontalo, 2019.

Jurnal

Andani, Devi, and Wiwin Budi Pratiwi. "Prinsip Pembuktian Sederhana Dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28, no. 3 (2021): 635–56.
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss2.art9>.

Aziz, Muhammad Fauzan, Sunarni, and Robert. "Penyelesaian Sengketa Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Oleh Pekerja

Terhadap Perusahaan Yang Tidak Membayar Kewajibannya.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 15, no. 10 (2024): 1–14.

Jahari, Akis, and Rachmatin Artita. “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Akibat Pemutusan Hubungan Kerja Tanpa Pesangon Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.” *Case Law : Journal of Law* 4, no. 2 (2023): 79–100.
<https://doi.org/https://doi.org/10.25157/caselaw.v4i2.3264>.

Julyano, Mario, and Aditya Yuli Sulistyawan. “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum.” *Jurnal Crepido* 01 (2019): 13–22.

Laheri, Putu Eva. “Probabilitas Pengajuan Permohonan Pailit Terhadap Perusahaan Atas Piutang Upah Pekerja/Buruh.” *Jurnal Advokasi* 9, no. 01 (June 10, 2019): 44–55.

Likadja, Jeffry Alexander CH. “Memaknai ‘Hukum Negara (Law Through State)’ dalam Bingkai ‘Negara Hukum (Rechtstaat).’” *Hasanuddin Law Review* 1, no. 1 (April 2015): 75–86.
<https://doi.org/https://doi.org/10.20956/halrev.v1i1.41>.

Nova, Fanny Gresta. “Keabsahan Permohonan Pailit dan PKPU oleh Pekerja sebagai Alternatif Penyelesaian Kegagalan Pembayaran Upah.” *Jurnal Yustika* 27, no. 01 (July 1, 2024): 42–53. <http://journal.ubaya.ac.id/index.php/yustika>.

Permatasari, Yofi, and Ariawan Gunadi. “Perspektif Politik Hukum Sehubungan Ketentuan Pembuktian Secara Sederhana Dalam Penyelesaian Utang-Piutang

- Menurut Hukum Kepailitan.” *Rawang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 10 (2024): 1–17.
- Pramudita. “Pembuktian Sederhana Pengajuan Permohonan Pailit Oleh Pekerja Atas Dasar Upah Yang Tidak Dibayar.” *Jurist-Diction* 4, no. 5 (2021): 1921–36. <https://doi.org/10.20473/jd.v4i5.29826>.
- Putri, Clarisa Permata Hariono. “Problematika Hukum Substansi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Sebagai Dasar Hukum Pengajuan Kepailitan Buruh.” *Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2024): 79–94.
- Seragih, Muhammad Thaufik, and Widodo Ramadhana. “Analisis Yuridis Kedudukan Hukum Karyawan Dalam Mengajukan Permohonan PKPU Terhadap Debitor Di Pengadilan Niaga.” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 4 (2024): 1–12.
- Shubhan, M. Hadi. “Fenomena Hukum Pengajuan Kepailitan Terhadap Pengusaha Oleh Pekerja Karena Hak Pekerja Yang Tidak Dibayar Pengusaha.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 2 (September 28, 2020): 519–539. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no2.2589>.
- Silalahi, Rumelda. “Kajian Hukum Atas Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Secara Konsiliasi.” *Jurnal Darma Agung XXVII*, no. 2 (2019): 1000–1011. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v27i2.276>.
- Simanjuntak, Herry Anto. “Prinsip-Prinsip Dalam Hukum Kepailitan Dalam Penyelesaian Utang Debitor Kepada Kreditur.” *Jurnal Justiq* 02, no. 02 (2020): 17–28.

Sinaga, Niru Anita. “Peranan Perjanjian Kerja Dalam Mewujudkan Terlaksananya Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hubungan Ketenagakerjaan.” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 7, no. 2 (2017): 30–45.
<https://doi.org/https://doi.org/10.35968/jh.v7i2.132>.

Wibowo, Rudi Febrianto, and Ratna Herawati. “Perlindungan Bagi Pekerja Atas Tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Secara Sepihak.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 1 (2021): 109–20.
<https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.109-120>.

Wijayanta, Tata. “Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga.” *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 3325 (2013): 216–26.

———. “Kajian Tentang Pengaturan Syarat Kepailitan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.” *Mimbar Hukum* 26, no. 1 (2014): 1–13.

Zulkarnaen, Ahmad Hunaeni, and Tanti Kirana Utami. “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dalam Pelaksanaan Hubungan Industrial.” *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2016): 407–27.

Skripsi/Tesis/Disertasi

Djaya, Subhan. “Kedudukan Pekerja Sebagai Kreditor Preferen dalam Kepailitan.” Universitas Hasanuddin, 2020.

Fitasari, Farlina Dwi. Keabsahan Permohonan Pailit yang Diajukan oleh Buruh tanpa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial. Skripsi, Universitas Airlangga, 2020.

Ibadurakhman, Kevin Kusuma. Penyelesaian Perselisihan Uang Pesangon sebagai

Hak Para Pekerja melalui Permohonan Pernyataan Pailit. Skripsi, Universitas Nasional, 2023.

Internet

Ady Thea, "Perselisihan Hak-PHK Lewat Instrumen Kepailitan Berdampak Negatif bagi Perusahaan," *Hukumonline*, diakses 24 Januari 2026, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perselisihan-hak-phk-lewat-instrumen-kepailitan-berdampak-negatif-bagi-perusahaan-lt617f8ffcb8922/>.

Bonnik Manoe, "Pabrik Tekstil Panamtex di Pekalongan Pailit," *Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia*, diakses 26 Januari 2026, <https://wantimpres.go.id/id/newsflows/pabrik-tekstil-panamtex-di-pekalongan-pailit/>.

Edy Pramana, "Produsen Sepatu Bata Digugat Pailit," *JawaPos*, diakses 25 Januari 2026, <https://www.jawapos.com/ekonomi/01315757/produsen-sepatu-bata-digugat-pailit>.

IBLAM School of Law, "Pemahaman Hukum Hubungan Industrial Dan Pelaksanaannya," diakses 5 Januari 2026, <https://iblam.ac.id/2025/08/08/pemahaman-hukum-hubungan-industrial-dan-pelaksanaannya/>.

Nafiatul Munawaroh, "3 Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial," *Hukumonline*, diakses 24 Januari 2026, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/3-mekanisme-penyelesaian-perselisihan-hubungan-industrial-lt4b82643d06be9/>.

Nandito Putra, "Tak Bayar Pesangon, Susi Air Digugat Pailit Eks Karyawan," *Tempo*, diakses 25 Januari 2026, <https://www.tempo.co/ekonomi/tak-bayar-pesangon-susi-air-digugat-pailit-eks-karyawan-2101924>.

Shifa Nurhaliza, "Bayar Utang, Perusahaan Sepatu BATA Lolos dari Pailit," *IDX Channel*, diakses 25 Januari 2026, <https://www.idxchannel.com/market-news/bayar-utang-perusahaan-sepatu-bata-lolos-dari-pailit/all>.

Sovia Hasanah, "Arti Concursus Creditorum dalam Kepailitan," *Hukumonline*, diakses 25 Januari 2026 <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-iconcursus-creditorum-i-dalam-kepailitan-lt5acd6fb6afb3d/>.

SPN News, "‘No Work, No Pay’: Antara Hak dan Kewajiban Dalam Dunia Kerja yang Berubah", diakses pada 24 Januari 2026, <https://spn.or.id/no-work-no-pay-antara-hak-dan-kewajiban-dalam-dunia-kerja-yang-berubah/>.

SPN News, "Wamenaker RI Kunjungi Mantan Karyawan PT Dupantex dan PT Panamtex di Pekalongan, Negara Diminta Hadir Lindungi Hak Buruh", diakses 26 Januari 2026, <https://spn.or.id/wamenaker-ri-kunjungi-mantan-karyawan-pt-dupantex-dan-pt-panamtex-di-pekalongan-negara-diminta-hadir-lindungi-hak-buruh/>.